KOTA YOGYA MASIH ALAMI DEFLASI

Pemkot Dinilai Tepat Hadapi Potensi Kenaikan Harga

YOGYA (KR) - Sejak sebelum Ramadan sejumlah intervensi sudah dilakukan Pemkot Yogya guna menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Upaya antisipatif yang dilakukan tersebut pun dinilai tepat lantaran pola yang selama ini terjadi yakni momentum Ramadan dan Idul Fitri memicu terjadinya inflasi.

Salah satu intervensi yang dilakukan oleh Pemkot Yogya yakni menggelar pasar murah kemantren. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat menekan dampak fluktuasi harga jelang Ramadan maupun Lebaran. "Kami akan terus memantau perkembangan harga di lapangan, mengingat bulan Maret masih panjang. Prediksi untuk tiga minggu ke depan masih belum bisa dipastikan, tetapi dengan upaya yang dilakukan, diharapkan lonjakan harga bisa dikendalikan. Sudah ada langkah strategis yang dilakukan oleh Kota Yogya," tandas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogya Mainil Asni, Selasa (4/3).

Selain di sektor pangan, transportasi juga menjadi sektor yang tak luput dari intervensi. Pemkot selama beberapa tahun ini memberikan subsidi biaya angkut untuk distributor bahan makan. Bahkan tidak hanya Pemkot, pemerintah pusat juga menaruh perhatian sektor transportasi dengan memberikan subsidi melalui diskon. Terutama transportasi angkutan penumpang udara. "Secara pola, memang biasanya menjelang Lebaran inflasi meningkat, salah satunya harga transportasi mengalami kenaikan. Namun, kami masih perlu melihat perkembangan lebih lanjut, terutama karena ada kebijakan pemerintah terkait diskon transportasi udara. Saat ini, kami belum tahu secara pasti seberapa besar diskon yang diberikan, kapan mulai diberlakukan, dan berapa lama durasinya," urainya.

Menurutnya, jika hanya berlaku dalam satu atau dua hari dan hanya berlangsung dalam waktu singkat, dampaknya mungkin tidak signifikan. Namun, jika diterapkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, kebijakan ini bisa menjadi faktor penyeimbang dalam laju inflasi dari sektor transportasi.

Selain transportasi, beberapa komoditas bahan pangan juga mulai menunjukkan tren kenaikan harga. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pekan lalu, sejumlah bahan pokok sudah mengalami kenaikan meskipun belum signifikan. "Beberapa komoditas seperti telur ayam, minyak goreng, dan cabai rawit mulai mengalami kenaikan harga. Walaupun belum terlalu tinggi, pergerakan ini patut diwaspadai," tambahnya.

Sementara itu pada Februari 2025, Mainil Asni mengungkapkan Kota Yogya mengalami deflasi sebesar 0,85 persen jika dibandingkan Januari 2025. Namun jika dibandingkan dengan Februari 2024, inflasi tercatat sebesar 0,11 persen, akan tetapi secara tahun kalender (Januari-Februari 2025) masih terjadi deflasi sebesar 1,20 persen.

Deflasi sepanjang bulan kemarin banyak disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan andil 0,92 persen. "Penurunan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tarif listrik. Jika sebelumnya diskon hanya berlaku bagi pelanggan prabayar, maka pada Februari 2025 berlaku juga bagi pelanggan pascabayar. Hal ini berdampak signifikan terhadap angka inflasi," jelasnya.

Dirinya menambahkan tren deflasi ini telah terjadi selama dua bulan berturut-turut. Pada Januari 2025, deflasi tercatat sebesar 0,36 persen dan Februari menjadi 0,85 persen. Kondisi ini merupakan angka terendah dalam beberapa tahun terakhir. **(Dhi)-f**

PENGOLAHAN BELUM BISA MAKSIMAL

Evakuasi Sampah Harus Dilakukan Bertahap

KR-Riyana Ekawati

Beny Suharsono

YOGYA (KR) - Pengelolaan dan penanganan sampah sampai saat ini masih menjadi persoalan bagi sejumlah kabupaten/kota di DIY, termasuk Kota Yogyakarta. Menyikapi hal tersebut

Pemda DIY menyatakan siap membantu penanganan sampah di Kota Yogyakarta. Hal itu tentunya sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo yang fokus dalam menangani sampah.

"Kami sudah diajak berdiskusi oleh tim terkait penanganan sampah, terutama di wilayah perkotaan. Saat ini, pengolahan sampah di beberapa wilayah (Kota Yogyakarta) masih belum bisa beroperasi penuh. Oleh karena itu, evakuasi sampah harus dilakukan secara bertahap. Bahkan seandainya benar-benar diperlukan Pemda DIY menyiapkan lahan di TPA Piyungan untuk mengevakuasi sekitar 4.000 ton dari Kota Yogyakarta, " kata Sekda DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan Selasa (4/3).

Beny mengatakan, berdasar data yang ada setiap truk bisa mengangkut sekitar 5-7 ton sampah dari Kota Yogyakarta. Truk-truk tersebut bisa mengangkut sampah secara bertahap. Pemda akan menggunakan data yang ada untuk menata pengelolaan sampah dengan lebih baik. Sedangkan untuk wilayah kabupaten lain seperti Bantul dan Sleman, pengelolaan sampah masih dikelola Pemkab. Mengingat hal itu masih lebih mudah dilakukan, apa lagi dengan adanya lahan. Kondisi itu berbeda dengan Kota Yogyakarta dimana untuk penanganan harus dilakukan secara sistematis.

"Apabila persoalan sampah tidak ditangani dengan cepat, Kami khawatir tumpukan sampah akan semakin menggunung. Apalagi sebentar lagi banyak wisatawan dan pemudik yang akan datang ke Yogyakarta. Dengan adanya koordinasi dan penanganan sampah secara baik, kami berharap masalah sampah bisa segera ditanggani," ungkapnya.

Sekda DIY menambahkan, rencananya pada Maret 2025 mendatang akan ada peluncuran Intermediate Treatment Facility (ITF) atau sistem pengolahan sampah baru di Bawuran Bantul. Dimana nantinya di lokasi tersebut akan ada dua fasilitas, satu untuk pengolahan sampah dan satu lagi untuk mengubahnya menjadi bahan industri.

"Kami mendukung penggunaan lahan di TPA Piyungan dan terus berupaya mencari solusi terbaik untuk pengelolaan sampah. Apalagi, sebentar lagi akan masuk masa Lebaran. Aktivitas masyarakat akan meningkat, sehingga volume sampah juga akan bertambah. Oleh karena itu supaya wisatawan dan pemudik merasa nyaman sampah harus segera ditanggani," jelasnya. **(Ria)-f**

LAHAN PERTANIAN HANYA TERSISA 32 HEKTARE

Ketersediaan Beras Dijamin Melebihi Kebutuhan

YOGYA (KR) - Ketersediaan beras di Kota Yogya dipastikan melebihi kebutuhan masyarakat. Bahkan stok komoditas utama bahan makan tersebut aman hingga tiga bulan ke depan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Sukidi, menjelaskan kebutuhan beras di Kota Yogya mencapai rata-rata sekitar 1.540 ton per bulan, sedangkan ketersediaannya saat ini mencapai 4.400 ton. "Aman sampai tiga bulan untuk mencukupi kebutuhan seluruh penduduk Kota Yogya," tandasnya, Selasa (4/3).

Kebutuhan 1.540 ton beras per bulan itu sebetulnya tidak hanya untuk penduduk pribumi melainkan juga warga yang tengah beraktivitas di Kota Yogya. Total penduduk Kota Yogya saat ini tercatat sekitar 400.000 jiwa, sedangkan jumlah warga yang sehari-hari beraktivitas terutama pada jam kerja atau jam sekolah mencapai 1,2 juta jiwa.

Sukidi menambahkan, ketersediaan beras tersebut mayoritas dipasok dari luar daerah. Hal ini karena Kota Yogya bukan merupakan daerah produksi pertanian melainkan kawasan konsumen. Luas lahan pertanian yang tersisa kini hanya 32 hektare. Jika lahan pertanian itu seluruhnya ditanami beras, hanya mampu memproduksi sekitar enam ton gabah kering per hektare. "Itu hanya mampu untuk kebutuhan penduduk Kota Yogya dalam tiga hari saja. Makanya kebutuhan beras maupun bahan pangan lainnya selalu dipasok dari luar," jelasnya.

Oleh karena itu masyarakat juga tidak perlu khawatir lantaran jalinan kerja sama antara Pemkot Yogya dengan daerah penghasil pangan selalu terjalin baik. Terutama daerah penyangga seperti Bantul, Sleman dan Kulonprogo. Stok beras di kawasan tersebut selalu berlebih sehingga harus dipasarkan ke luar, dan Kota Yogya setiap bulan selalu menjadi daerah tujuan. Di samping itu daerah di luar DIY juga rutin menyetorkan pasokan beras untuk kualitas mediumnya seperti dari Klaten, Purworejo, Sukoharjo dan Blitar.

"Makanya kami imbau masyarakat tidak perlu panik terkait kebutuhan pangan terutama beras ini. Membeli sesuai kebutuhan saja agar tidak berdampak pada inflasi. Sampai nanti setelah Idul Fitri, stok yang ada sekarang masih sangat mencukupi," imbuhnya.

Selain itu, Pemkot Yogya setiap tahun juga rutin mencadangkan beras untuk kepentingan darurat. Cadangan beras salah satunya dikerjasamakan dengan PD Tarumartani yang jika dibutuhkan sewaktu-waktu bisa langsung direalisasikan. Cadangan beras milik Pemkot Yogya yang mencapai 65,05 ton sampai saat ini juga belum pernah digunakan. Bahkan setiap tahun selalu ditambah seiring melimpahnya hasil produksi.

"Kami juga udah menerjunkan tim untuk memantau ketersediaan di pasar tradisional maupun retail. Selama Ramadan ini setiap minggu bisa tiga kali pemantauan lapangan. Saat itu juga kita bisa mengetahui bahan apa saja yang sedang banyak dibutuhkan dan bagaimana ketersediaannya," urainya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogya Sri Riswanti, memaparkan sejak jelang Ramadan pihaknya telah melakukan pengecekan stok bahan makanan baik di gudang maupun retail.

Hasilnya, pasokan dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri. Meski demikian, dirinya mewaspadai sejumlah komoditas di pasar rakyat yang berpotensi mengalami lonjakan harga seperti minyak goreng, gula pasir, hingga harga cabai. Oleh karena itu Riswanto juga mengajak masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok seperlunya dan tidak membeli stok secara berlebihan. **(Dhi)-f**

Dosen UAD Gelar Pengabdian Masyarakat di Korea Selatan

KR-Istimewa

Phisca dan Hayati (tengah) bersama peserta pelatihan di Busan Korea Selatan.

YOGYA (KR) - Dua dosen Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Ir Phisca Aditya Rosyady SSi MSc dari Teknik Elektro dan Hayati Mukti Asih ST MSc PhD dari Teknik Industri menyelenggarakan program pengabdian masyarakat berjudul 'Eco-Friendly Workplace: Green Living and Energy Efficiency Training for Foreign Youth in Pukyong' di Busan Korea Selatan, baru-baru ini.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep keberlanjutan di lingkungan kerja, serta meningkatkan kesadaran tentang penerapan gaya hidup ramah lingkungan dan efisiensi energi dalam keseharian. Dengan latar belakang kepakaran masing-masing, Phisca membahas efisiensi energi listrik dan pemanfaatan teknologi hijau dalam lingkungan kerja modern. Sementara Hayati menyoroti aspek keberlanjutan manajemen sampah.

Sebagai bagian dari pelatihan, para peserta diajak untuk memahami prinsip dasar keberlanjutan, praktik terbaik dalam mengurangi jejak karbon, serta strategi untuk mengoptimalkan penggunaan energi di tempat kerja. Selain itu, mereka juga diberikan wawasan tentang inovasi teknologi yang dapat mendukung efisiensi energi listrik dan pengelolaan sumber daya secara lebih bertanggung jawab.

"Kami berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi para peserta, tidak hanya dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang keberlanjutan, tetapi juga dalam menginspirasi mereka untuk menerapkan praktik ramah lingkungan di kehidupan sehari-hari," ujar Hayati.

Phisca Aditya Rosyady menambahkan bahwa pengenalan teknologi hemat energi khususnya listrik dalam kehidupan dan lingkungan kerja dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). "Kami ingin menunjukkan bahwa efisiensi energi listrik bukan hanya sekadar konsep, tetapi dapat diimplementasikan dengan langkah-langkah praktis yang berdampak besar bagi lingkungan," ujarnya. **(Dev)-f**

PENGUMUMAN
LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit pada Surat Kabar Harian Koran Kedaulatan Rakyat yang terbit tanggal 07 Januari 2025 dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Panin, Tbk Kantor Cabang Utama Yogyakarta selaku Penjual, beralamat Jl. Gejayan CT.X No. 10, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang **(open bidding)** melalui aplikasi lelang (**lelang.go.id** dan/atau **portal.lelang.go.id**/) terhadap obyek jaminan atas nama debitur sebagai berikut :

ENDANG ERMAWATI

Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala turutan diatasnya tanpa kecuali Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 16646, luas 88 m2 (Delapan puluh delapan Meter Persegi), terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , atas nama Nyonya ENDANG ERMAWATI

Harga Limit Rp. 354,000,000.00 dengan Uang Jaminan : Rp. 70,800,000.00

Waktu Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal	: Rabu, 19 Maret 2025
Waktu Penawaran	: sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 19 Maret 2025, pukul 11.00 (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: **lelang.go.id dan/atau portal.lelang.go.id**
Tempat/Pelaksanaan Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Jalan Kusumanegara No.11, Yogyakarta
Penetapan Pemenang	: setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara terbuka (open bidding) menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada alamat domain **https://www.lelang.go.id/** atau **https://portal.lelang.go.id/** Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosesdur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mangaktifkan akun pada **https://www.lelang.go.id/** atau **https://portal.lelang.go.id/** dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file*jpg^png)dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.
3. Jaminan penawaran lelang:
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil), dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
   b. Jaminan disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* peserta lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan.
5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2%, pembayaran BPHTB sesuai ketentuan dan harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada. Pembeli dikenakan PPN sebesar 1,1% dari harga lelang (vide PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai) dan bukti setornya diserahkan kepada PT. Bank PANIN, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta.
6. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Informasi lebih lanjut tentang cara menawar/persyaratan lelang, dapat menghubungi PT. Bank PANIN, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta, Jl. Gejayan CT.X No. 10, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp : (0274) 541777 Ext.229 atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No.11, Yogyakarta Tlp (0274) 544091.

Yogyakarta, 05 Maret 2025
PT. Bank Panin, Tbk KCU Yogyakarta
Ttd;
Branch Manager

PaninBank

CHOLIQ NUGROHO ADJI, FRAKSI PARTAI NASDEM

Kawal Program Walikota, Realisasikan 'Hasta Jogja Mulia'

YOGYA (KR) - Program 'Hasta Jogja Mulia' yang digulirkan oleh walikota menjadi salah satu aspek yang dikawal kalangan dewan. Terutama yang menyangkut masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan agar segera direalisasikan. Hal ini karena masalah tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogya yang juga duduk di Komisi D, Choliq Nugroho Adji, mengungkapkan terdapat delapan program strategis yang menjadi janji Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan dan tertuang dalam 'Hasta Jogja Mulia'. "Program strategis itu sebelumnya tentu sudah dibahas bersama tim transisi di internal eksekutif. Sehingga begitu resmi dilantik sebagai walikota dan wakil walikota, Hasto-Wawan, bisa langsung merealisasikan Hasta Jogja Mulia itu," ungkapnya.

Dicontohkannya masalah derajat pendidikan, ada program unggulan berupa satu keluarga miskin satu sarjana. Itu tentunya dapat diwujudkan melalui beasiswa bagi minimal salah satu anggota keluarga miskin hingga tingkat perguruan tinggi. Alokasi anggaran yang dikelola UPT Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dinilainya mampu mengakomodir beasiswa tersebut. Sehingga perlu segera dimatangkan petunjuk teknisnya supaya saat tahun ajaran baru sudah bisa digulirkan.

KR-Ardhi Wahdan

Begitu juga urusan kesehatan yang bakal dituangkan dalam tiga program unggulan. Masing-masing posyandu paripurna sebagai gerakan warga sehat, kartu keluarga sebagai jaminan kesehatan warga, dan satu kampung satu bidan. Adji menilai, pihaknya di Komisi D sejauh ini sudah memberikan dukungan penuh terhadap operasional posyandu di wilayah. "Masing-masing posyandu saat ini sudah memiliki peralatan yang memadai hasil advokasi kami ke Kementerian Kesehatan. Dukungan anggaran untuk operasional maupun transport bagi para penggeraknya juga sudah terfasilitasi. Jika posyandu paripurna masuk dalam program unggulan Hasto-Wawan, harapan kami keberlangsungannya semakin optimal," urainya.

Adji juga mendorong agar kartu keluarga sebagai jaminan kesehatan warga segera dijabarkan implementasi teknisnya. Hal ini karena cakupan universal coverage atas program JKN di Kota Yogya merupakan tertinggi di Indonesia. Selain itu masih didukung oleh program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD). "Jangan sampai itu nanti malah menjadi tumpang tindih. Tetapi justru bagaimana mampu memperkuat supaya semua penduduk Kota Yogya terjamin kesehatannya," tandasnya.

Begitu pula program satu kampung satu bidan. Menurut Adji, keberadaan kader kesehatan yang tersebar di tiap wilayah bisa dikolaborasikan dengan program satu kampung satu bidan. Dirinya pun mendukung program tersebut karena bisa menggerakkan upaya deteksi dini terhadap kesehatan warga sekaligus mencegah terjadinya KLB suatu penyakit di wilayah. "Sepanjang program itu muaranya adalah untuk kepentingan warga, maka kami di dewan pasti akan mendukung. Sekaligus mengawal agar benar-benar terealisasi, dan tidak hanya sebatas janji," katanya. **(Dhi)-f**